



2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KATA PENGANTAR

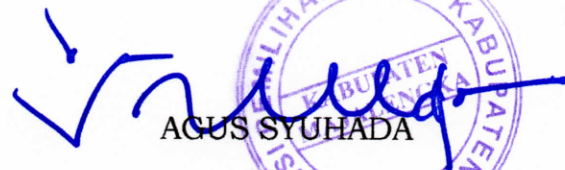
Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Majalengka dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Majalengka melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Majalengka, Desember 2020

Ketua,


AGUS SYUHADA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Majalengka dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk menunjang hal tersebut maka diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Dalam konteks Perencanaan Strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai Satuan Kerja (Satker) turunan dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lepas dari ketentuan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan Rencana Kerja Tahunannya. Substansi dari Renstra itu sendiri merupakan Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal maupun eksternal lembaga yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis tersebut kemudian diwujudkan dalam kerangka pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis lembaga dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh lembaga KPU Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Majalengka adalah sebagai dokumen yang penting karena tidak saja menjadi landasan pelaksanaan Program dan Kegiatan secara berkesinambungan yang bersifat hasil (*Outcome*) dan keluaran (*Output*) tetapi juga bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/lembaga.

Renstra KPU Kabupaten Majalengka 2020-2024 itu sendiri disusun dengan mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Adapun Teknis Penyusunannya didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra KPU Kabupaten Majalengka 2019-2024 adalah:

1. sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di KPU Kabupaten Majalengka; dan
2. untuk memberikan panduan/acuan bagi KPU Kabupaten Majalengka dalam melakukan perencanaan, pengendalian program/kegiatan dan anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra KPU Kabupaten Majalengka :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 KPU Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

D. Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika Penulisan Renstra KPU Kabupaten Majalengka secara garis besar terdiri dari atas beberapa bab dan lampiran, dengan susunan sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan Rencana Strategis;

- 2. Tugas Pokok dan Fungsi
Pada bab tugas pokok dan fungsi berisikan penjelasan mengenai struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan sumber daya manusia;
- 3. Kondisi Umum
Pada bab kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan;
- 4. Program dan Kegiatan
Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan;
- 5. Penutup
Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Kabupaten Majalegka dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Kabupaten Majalengka;
- 6. Lampiran-lampiran

Gambar 1
Sistematika Renstra KPU Kabupaten Kabupaten Majalengka

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Maksud dan Tujuan
	C. Landasan Hukum
	D. Sistematika Penulisan Rencana Srategis
BAB II	TUGAS POKOK DAN FUNGSI
	A Struktur Organisasi
	B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban
	C. Dukungan Sumber Daya Manusi
BAB III	KONDISI UMUM
	A. Kondisi Umum Saat Ini
	B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke depan
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN
	A. Program Tahun 2020-2024
	B. Kegiatan Tahun 2020-2024
	C. Target Kinerja Tahun 2020-2024
BAB V	PENUTUP

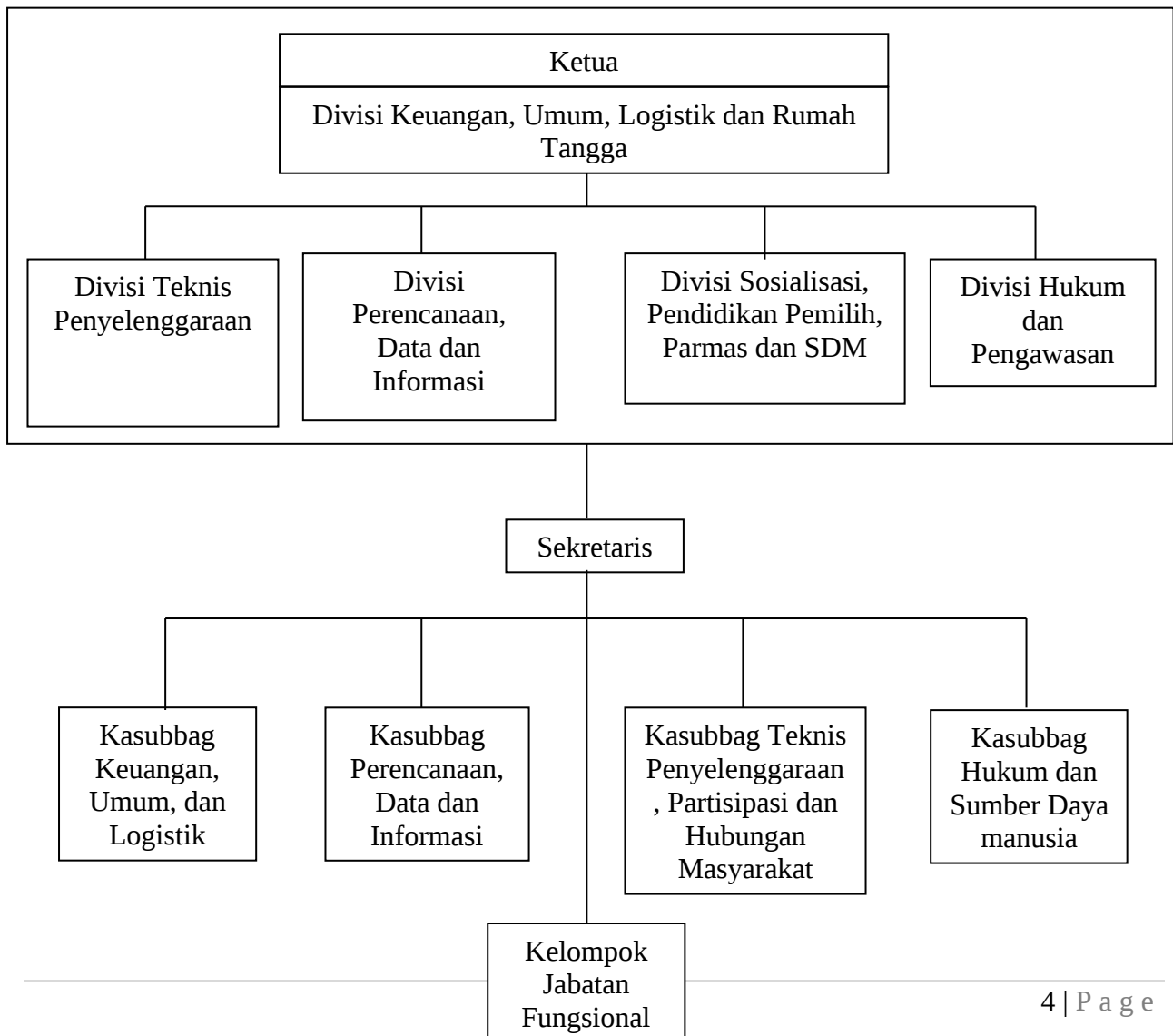
BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Majalengka

KPU Kabupaten Majalengka merupakan lembaga non-struktural yang terdiri dari 5 (lima) anggota Komisioner yang dipimpin oleh seorang Ketua merangkap sebagai anggota. Dalam menjalankan tugasnya Komisioner KPU Kabupaten Majalengka dibantu secara teknis administratif oleh Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang dipimpin oleh sekretaris setingkat pejabat eselon III. Ada 4 (empat) Subbagian yang merupakan bawahan langsung sekretaris yaitu subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik, Subbagian Teknis, Partisipasi, dan Hupmas, Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Subbagian Hukum dan SDM. Kemudian di masing-masing subbagian terdapat staf/fungsional umum yang membantu kepala subbagian dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.

Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Dalam rangka Menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dilakukan pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Majalengka sebagai berikut ini :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;

Tugas : Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

Tugas : Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye pemilu dan pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;

Tugas : mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. menjabarkan program dan anggaran;

- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan;

Tugas : mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye;
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Tugas : mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non-tahapan pemilu dan pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode etik, dan Kode Prilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam pelaksanaan tugasnya komisioner KPU Kabupaten Majalengka dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris (Eselon III). Secara Fungsional sekretaris KPU Kabupaten Majalengka bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka namun secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka dibantu oleh 4 (empat) subbagian sebagai berikut :

1. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;

Tugas : mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu.

2. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

Tugas : melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta pemilu, serta administrasi keuangan, dan Dana Kampanye.

3. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Tugas : Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka, pengisian anggota DPRD Kabupaten Majalengka pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Tugas : mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Majalengka didukung oleh 19 (sembilan belas) pegawai ditambah 5 (lima) Komisioner dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, antara lain: SMA, D3 dan S1 dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

NO	Jabatan	Golongan				Pendidikan Terakhir				Jumlah
		I	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2	
1	Anggota KPU							3	2	5
2	Sekretaris			1				1		1

3	Kasubbag			2				2		2
4	Staf PNS		4	2		2	3	1		6
5	Tenaga Kontrak					8		3		11
	Jumlah		4	5		10	3	9	2	25

berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan pada tabel diatas menunjukan pola distribusi yang seimbang antara sarjana ke atas berjumlah 11 orang sedangkan D3 ke bawah sebanyak 12 orang. Sehingga dapat dikatakan kekuatan SDM KPU Kabupaten Majalengka cukup baik dan merata. Selain itu latar belakang keilmuan yang dimiliki para pegawai KPU Kabupaten Majalengka hampir seluruhnya sesuai dengan kebutuhan lembaga, antara lain Hukum, Administrasi Publik, Administrasi Negara, Ilmu Komputer, Ekonomi, Informatika. Hal ini tetntu sangat menunjang kesiapan KPU Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga.

Dianalisis dari sisi beban kerja, KPU Kabupaten Majalengka masih belum memenuhi kebutuhan standar. Hal ini ditunjukan dengan masih adanya kekosongan pada 2 (dua) jabatan eselon IV subbagian Teknis dan Hupmas serta Subbagian Umum. Kebutuhan staf juga masih terbilang minim, dari 6 (enam) orang staf yang ada 4 (empat) orang staf berada di subbagian umum, 1 (satu) orang staf di subbagian Perencanaan, Data dan Informasi serta 1 (satu) orang staf di Subbagian Teknis dan Hupmas, dan tak satupun staf di subbagian Hukum. Kondisi seperti ini menunjukan bahwa KPU Kabupaten Majalengka masih membutuhkan beberapa pegawai untuk mengisi jabatan eselon IV dan staf/fungsional umum. Namun Kondisi eksisting SDM saat ini tidak mempengaruhi pada kinerja dan kualitas hasil pekerjaan.

BAB III

KONDISI UMUM

A. Kondisi Umum

Untuk melihat Gambaran utuh KPU Kabupaten Majalengka sebagai sebuah lembaga pemerintahan vertikal yang independen perlu dilakukan analisis terhadap beberapa aspek, sebagai berikut :

a. Aspek Kelembagaan

1. KPU Kabupaten Majalengka telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaanya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pilkada Majalengka 2018 serta Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Majalengka yang berjalan sukses tanpa eksekusi bahkan menghasilkan sebuah penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Barat pada perhelatan KPU Award tahun 2019. Perhelatan dalam bentuk pemberian penghargaan itu merupakan apresiasi kepada KPU Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, Adapun KPU Kabupaten Majalengka mendapat juara pertama pada kategori Penyelenggaraan dan Pemilihan yang Berintegritas.
2. Budaya organisasi sebagai penyelenggara pemilu terus dibina dan dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga setiap pegawai KPU Kabupaten Majalengka di setiap tingkatan tidak saja memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi tetapi juga memiliki kesadaran dan rasa memiliki bersama. Hal ini dilakukan salah satunya dengan mengadakan kegiatan *knowledge sharing*, *briefing* rutin hingga siraman rohani terhadap seluruh pegawai KPU Kabupaten Majalengka.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Secara Umum SDM di KPU Kabupaten Majalengka dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Majalengka memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
2. Para pegawai KPU Kabupaten Majalengka hingga saat ini sebagian besar sudah berpengalaman sebagai penyelenggara pemilihan baik itu Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, Pemilihan anggota Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, bahkan

dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sehingga pemahaman teknis dan administratif menjadi sangat mumpuni;

3. Beberapa pegawai KPU Kabupaten Majalengka telah mengikuti berbagai macam diklat struktural dan teknis yang tentunya sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan dalam menjalankan tugas.

c. Aspek Kepemimpinan

1. Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Majalengka memiliki keinginan yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Majalengka ke arah yang lebih baik;
2. Ketua KPU Kabupaten Majalengka selalu berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga;
3. Pimpinan lembaga dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya dengan baik;
4. Pimpinan lembaga telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen lembaga.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Secara umum KPU Kabupaten Majalengka telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Potensi atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen lembaga;
2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
4. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi KPU Kabupaten Majalengka sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Secara Umum KPU Kabupaten Majalengka telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Gambaran umum aspek *business process* dan kebijakan diuraikan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Majalengka berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu KPU

Kabupaten Majalengka mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai *stakeholder*;

2. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;
3. KPU Kabupaten Majalengka berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik;

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Gambaran umum aspek dukungan infrastruktur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Majalengka belum memiliki Gedung permanen sehingga gedung yang selama ini dipakai masih merupakan milik Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka sengan status Pinjam Pakai;
2. Terkait dengan status Gedung Pinjam Pakai maka KPU Kabupaten Majalengka Kesulitan untuk menambahkan anggaran pemeliharaan gedung dari KPU RI dan disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka juga tidak memberikan Hibah Pemeliharaan gedung.

Sedangkan Gambaran umum aspek dukungan Teknologi Informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Simak BMN Tahun 2020, KPU Kabupaten Majalengka tercatat memiliki 23 Unit PC, dan 14 Unit Laptop/Notebook serta 20 Unit Printer dalam kondisi siap pakai, hal ini menunjukkan bahwa dukungan hardware teknologi informasi sudah sangat mumpuni;
2. Dukungan Jaringan nirkabel telkom untuk dukungan internet dengan kecepatan 10 MBps, dinilai cukup jika hanya digunakan untuk mengakses ke dalam jaringan internet dalam rangka pencarian informasi ataupun pengiriman berkas digital baik itu melalui e-mail ataupun aplikasi sosial namun, hal tersebut akan terasa kurang mumpuni jika digunakan untuk melakukan Rapat/pertemuan secara daring/ *teleconferensi*.

g. Aspek Hubungan dengan stakeholder

Secara umum KPU Kabupaten Majalengka telah berhasil membina hubungan baik dengan *stakeholders*-nya. Potensi atas kekuatan aspek hubungan dengan stakeholdernya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Majalengka selalu berupaya membina hubungan yang baik dengan para *stakeholder* yang ada di Kabupaten Majalengka;

2. KPU Kabupaten Majalengka selalu berupaya membangun kemitraan strategis khususnya dengan Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka yang sifatnya saling mendukung;
3. KPU Kabupaten Majalengka berupaya membangun transparansi dengan stakeholder yang ada sesuai batas-batas yang diatur dalam undang-undang

B. Kondisi Yang diharapkan dan Proyeksi Kedepan

Melihat Gambaran Kondisi Rill KPU Kabupaten Majalengka dari berbagai sisi menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan yang harus diantisipasi secara bertahap, beberapa kelemahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Aspek Kelembagaan

1. Perlunya perluasan peran KPU Kabupaten Majalengka tidak saja sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu tetapi juga dapat memberikan warna terhadap kehidupan budaya setempat sehingga Budaya organisasi KPU Kabupaten Majalengka perlu di selaraskan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

1. Proses pemberdayaan melalui *knowlwdge sharing* dapat menjadi sarana/media yang sangat efektif bagi terciptanya Pegawai yang profesional yaitu pegawai yang tidak saja mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan tupoksinya tetapi juga memahami tugas-tugas di luar tupoksinya sehingga terbangun hubungan kerja yang harmonis antar bagian di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
2. Untuk memompa semangat pegawai maka perlu djalankan mekanisme reward bagi pegawai yang memiliki integritas dan prestasi dalam kurun waktu tertentu sehingga diharapkan memcau para pegawai untuk menjadi yang terbaik.

c. Aspek Kepemimpinan

1. Perlu adanya Penyegaran kembali format kepemimpinan di semua lini sehingga perbedaan persepsi antara sekretariat dan Komisioner bisa dihindari, ini penting terlebih menyangkut efisiensi pekerjaan yang menuntut respon cepat;
2. Penguatan kepemimpinan dalam hal perencanaan, implementasi dan Monitoring Pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

1. Masih adanya kegiatan tanpa anggaran, padahal Kegiatan tanpa dukungan anggaran yang memadai menjadi sebuah keniscayaan, bukan berarti tidak akan berjalan namun kegiatan tidak akan berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan sehingga diharapkan setiap kegiatan KPU Kabupaten Majalengka disokong dengan anggaran yang memadai;

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

1. Mengingat kompleksitas penyelenggaraan pemilu maka perlu adanya penerapan SOP setiap jenis layanan ataupun kegiatan agar terhindar dari tuntutan hukum;
2. Penguatan pada pengambilan Keputusan terkait dengan Kebijakan-kebijakan terkait tahapan pemilu yang dilandaskan pada kajian hukum

f. Aspek Dukungan Infra Struktur dan Teknologi Informasi

1. secara *de jure* KPU Kabupaten Majalengka belum memiliki gedung sebagai Kantor secara permanen namun secara *de facto* KPU Kabupaten Majalengka telah menempati gedung yang disediakan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan status Pinjam Pakai, ke depan perlu dilakukan pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk melakukan Hibah Daerah atas gedung tersebut kepada KPU Kabupaten majalengka dalam rangka memudahkan pemeliharaan gedung;
2. Untuk menunjang kelancaran aktivitas kantor hendaknya perlu dilakukan peningkatan Kecepatan akses Internet.

g. Aspek Hubungan dengan stakeholder

1. Adanya audiensi dalam format yang jelas dan terukur antara KPU Kabupaten Majalengka dengan para Stakeholder khususnya partai Politik tingkat Kabupaten Majalengka dan Bawaslu Kabupaten Majalengka dalam rangka penguatan fungsi serta respon dalam menyikapi isu-isu kepemiluan yang berkembang.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Tahun 2020-2024

Sebagai kesatuan dari entitas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka penyusunan program dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka mengacu pada Renstra KPU RI, sebagai berikut :

No.	Program	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Indikator
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya Fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
			Nilai Evaluasi atas

No.	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator
			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU
		Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase Ketepatan KPU Kabupaten Majalengka dalam memutakhirkan data Pemilih
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya Pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka yang disusun dan diharmonisasi sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Majalengka dalam mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan KPU Kabupaten Majalengka dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal Tahapan

B. Kegiatan Tahun 2020-2024

Program Dukungan Manajemen

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya Kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di dalam negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Majalengka yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase Ketercapaian target kinerja dengan perjanjian kinerja
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP dengan tepat waktu
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Majalengka	Nilai Minimal untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumberdaya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
			dan akurat
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
3.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Ketepatan waktu dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase Ketepatan dalam mengelolan arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Pasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Majalengka	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase kelayakan gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya kemandirian dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka	Persentase gangguan kemandirian dalam lingkungan KPU kabupaten Majalengka yang dapat ditanggulangi
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Internal Audit Capability Model) (Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerinta)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai minimal penilaian akuntabilitas kinerja
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase proses pembangunan Zona integritas menuju WBK(wilayah bebas Korupsi)/WBBM
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Majalengka	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU Kabupaten Majalengka yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU Lainnya (IT, Akuntansi, hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
			Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan

Program Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke mahkamah konstitusi
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Majalengka
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase proses pelaksanaan penetapan jadwal

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
		sesuai Jadwal	tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal
			Persentase Proses Pelaksanaan pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase ketepatan waktu proses PAW anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Jumlah Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi
		Terwujudnya Rncangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan pedoman desain dan Template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata Kelola KPU
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
		perorangan DPD	Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
4.	Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase proses pembentukan pusat pendidikan pemilih
			Persentase proses Penambahan kelengkapan digitalisasi rumah pintar pemilu (RPP)
		Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah Kegiatan pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum
		Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Jumlah Kegiatan pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk pemilih perempuan
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
			Jumlah Kegiatan pendidikan pilih kepemiluan dan demokrasi untuk pilih disabilitas
		Pendidikan pilih kepada kecamatan partisipasi rendah, kecamatan potensi pelanggaran pemilu tinggi dan kecamatan rawan konflik/bencana	Jumlah Kegiatan pendidikan pilih kepemiluan dan demokrasi untuk kecamatan partisipasi rendah, kecamatan potensi pelanggaran pemilu tinggi dan kecamatan rawan konflik/bencana
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/Pemilihan yang di tampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Majalengka paling lambat 1 hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten Majalengka kepada stakeholder (partai	Jumlah informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
		politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	yang ditampilkan di media publikasi
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase efektivitas anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase efektivitas dalam proses pengadaan logistik keperluan Pemilu dan Pemilihan
			Persentase efektivitas jenis, jumlah dan waktu dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan
			Persentase efektivitas dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah alokasi Penyediaan logistik daerah (kecamatan)
		Ketersediaan suara Pemilih	Persentase efektivitas pelaksanaan

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Pemilu/Pemilihan	Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- <i>government</i> KPU Kabupaten Majalengka	Alokasi waktu pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.

C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Berikut dijabarkan Target kinerja sasaran program dan kegiatan disajikan dalam tabel di bawah ini.

**TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM
RENSTRA KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2024**

No.	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya Fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana	Persentase Tersedianya sarana	100%	100%	100%	100%	100%

		dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik					
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase Ketepatan KPU Kabupaten Majalengka dalam memutakhirkan data	100%	100%	100%	100%	100%

			Pemilih					
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya Pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka yang disusun dan diharmonisasi sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Majalengka dalam mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan	-	100%	100%	100%	100%

			tepat waktu					
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan KPU Kabupaten Majalengka dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal Tahapan	-	100%	100%	100%	100%

**TARGET KINERJA SASARAN KEGIATAN
RENSTRA KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2024**

Program Dukungan Manajemen

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya Kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di dalam negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Majalengka yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi	Persentase laporan monitoring dan	75%	75%	75%	75%	75%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu					
			Persentase Ketercapaian target kinerja dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Majalengka	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan	100 %	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Administrasi Kepegawaian	sumberdaya manusia	kepegawaian secara tepat waktu dan akurat					
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	2.866	2.866	2.866
3.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	milik negara		pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan					
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Ketepatan waktu dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA					
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase keputusan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi persuratan dan	Persentase Ketepatan dalam mengelolan arsip Inaktif sesuai aturan	75%	75%	75%	75%	75%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pengelolaan arsip	kearsipan					
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Pasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Majalengka	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kelayakan gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU kabupaten Majalengka yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Internal Audit Capability Model) (Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)	3	3	3	3	3,4
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang	Persentase pengaduan masyarakat yang	90%	90%	90%	90%	95%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	ditindaklanjuti					
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai minimal penilaian akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase proses pembangunan Zona integritas menuju WBK (wilayah bebas Korupsi) /WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	serta Penelitian dan Pengembangan	KPU Kabupaten Majalengka	pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM					
			Jumlah PNS KPU Kabupaten Majalengka yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU Lainnya (IT, Akuntansi, hukum) sesuai jadwal	-	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
		Terwujudnya Kajian Litbang, riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Program Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara	90%	92%	93%	94%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP					
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	10 Perkara	5 Perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke mahkamah konstitusi	-	-	-	1 Perkara	1 Perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Majalengka	-	-	-	89%	90%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase proses pelaksanaan penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase Proses Pelaksanaan pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemlihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	-
		Terlaksananya layanan	Persentase ketepatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	proses PAW anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam waktu 5 hari kerja					
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Jumlah Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	16 Parpol	16 Parpol	16 Parpol	16 Parpol	16 Parpol
		Terwujudnya Rncangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan pedoman desain dan Template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata Kelola KPU	-	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk	-	1 Dokumen (Verpol)	1 Dokumen (Perseorangan)	1 Dokumen (Dakam)	-

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		kampanye, verifikasi partai politik dan anggota perseorangan DPD	pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan					
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	100%	100%
4.	Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase proses pembentukan pusat pendidikan pemilih	-	20%	20%	20%	20%
			Persentase proses Penambahan	-	20%	20%	20%	20%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			kelengkapan digitalisasi rumah pintar pemilu (RPP)					
		Pendidikan memilih kepada masyarakat umum	Jumlah Kegiatan pendidikan memilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Pendidika memilih kepada memilih pemula, perempuan dan disabilitas	Jumlah Kegiatan pendidikan memilih kepemiluan dan demokrasi untuk memilih perempuan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			Jumlah Kegiatan pendidikan memilih kepemiluan dan demokrasi untuk memilih pemula	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			pendidikan pilih kepemiluan dan demokrasi untuk pilih disabilitas					
		Pendidikan pilih kepada kecamatan partisipasi rendah, kecamatan potensi pelanggaran pemilu tinggi dan kecamatan rawan konflik/bencana	Jumlah Kegiatan pendidikan pilih kepemiluan dan demokrasi untuk untuk kecamatan partisipasi rendah, kecamatan potensi pelanggaran pemilu tinggi dan kecamatan rawan konflik/bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		akurat	melalui PPID sesuai dengan SOP					
			Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/Pemilihan yang di tampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Majalengka paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten Majalengka kepada stakeholder (partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi	Jumlah informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	2 Publikasi	2 Publikasi	2 Publikasi	2 Publikasi	2 Publikasi

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		dan Masyarakat)						
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase efektivitas anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase efektivitas dalam proses pengadaan logistik keperluan Pemilu dan Pemilihan	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase efektivitas jenis, jumlah dan waktu dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase	-	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			efektivitas dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
		Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah alokasi Penyediaan logistik daerah (kecamatan)	-	26 Kecamatan	26 Kecamatan	26 Kecamatan	26 Kecamatan
		Ketersediaan suara Pemilih Pemilu/Pemilihan	Persentase efektivitas pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	100%	100%	100%	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU Kabupaten Majalengka	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan melalui sistem informasi data pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Majalengka dan seluruh unit kerja dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini KPU Kabupaten Majalengka menyusun renstra 2020-2024 didasarkan pada Program Sasaran Program yang ditetapkan pada Renstra Komisi Pemilihan Umum dengan penyesuaian ruang lingkup kewenangan KPU Kabupaten Majalengka.

Rencana Startegis KPU Kabupaten Majalengka kemudian menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja agar implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Sebaik-baik apapun perencanaan, akan tetapi Allah SWT jualah yang akan menentukan hasil akhirnya. Oleh karenanya dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka 2020-2019 ditutup dengan sebuah doa “semoga Perencanaan KPU Kabupaten Majalengka hingga lima tahun kedepan dapat terwujud sebagaimana yang direncanakan” aamiin...aamiin...aamiin.